

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian (Uji Statistik)

5.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik data penelitian. Penelitian ini menggunakan 8 variabel, yang terdiri dari variabel dependen yaitu Pinjaman Daerah, variabel independen yaitu Jumlah Penduduk, Belanja Modal, dana transfer pemerintah, surplus/defisit anggaran, pendapatan perkapita, pendapatan asli daerah dan faktor politik. Pengukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata dan penjelasan variabel dummy untuk variabel faktor politik. Tabel 5.1 menyajikan statistik deskriptif ketujuh variabel yang diteliti.

Tabel 5.1

Hasil Analisis Desekriptif

| Variabel | N | Minimum | Maximum | Rata-rata | Standart deviasi |
|--------------------------|----|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Jumlah Penduduk | 57 | 120.873 | 2.508.698 | 901.004 | 633.112,89 |
| Belanja Modal | 57 | 50.302.095.109 | 464.305.000.000 | 173.290.442.532 | 89.720.273.840,71 |
| Dana Transfer | 57 | 48.664.624.186 | 2.198.650.000.000 | 898.372.566.627 | 452.602.758.965,89 |
| Surplus/Defisit Anggaran | 57 | -124.155.000.000 | 108.467.000.000 | 15.246.766.412 | 41.346.235.228 |
| Pendapatan Perkapita | 57 | 7.33 | 255.61 | 278.525 | 48.466 |
| Pendapatan Asli Daerah | 57 | 7.224.651.386 | 1.498.190.000.000 | 157.517.759.564 | 286.566.978.386 |
| Pinjaman Daerah | 57 | 1.771.002 | 51.136.659.052 | 7.622.987.589 | 12.320.980.205.664 |

Sumber : data sekunder diolah

5.1.1.1 Jumlah Penduduk

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel Jumlah Penduduk dapat dilihat pada tabel 5.1. berdasarkan tabel diatas Jumlah Penduduk terendah sejumlah 120.873 jiwa yang merupakan Jumlah Penduduk dari kota Mojokerto pada tahun 2012.

Disisi lain Jumlah Pendudukterbesarsejumlah 2.508.698 jiwa yang merupakan Jumlah Penduduk kabupaten Malang ditahun 2013. tingginya Jumlah Penduduk kabupaten Malang dapat meningkatkan kebutuhan barang publik. Untuk memenuhi kebutuhan barang publik pemerintah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

5.1.1.2 Belanja Modal

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 5.1. berdasarkan tabel diatas Belanja Modal terendah senilai Rp. 50.302.095.109 yang merupakan Belanja Modal dari kota Mojokerto pada tahun 2012. Rendahnya Belanja Modal kota Mojokerto menunjukkan serapan anggaran kota Mojokerto sangat rendah. Kondisi ini biasanya disebabkan karenakepala daerah takut menggunakan anggaran.

Disisi lain Belanja Modal terbesar senilai Rp.464.305.000.000 yang merupakan Belanja Modal kabupaten Malang ditahun 2013. Kondisi ini menunjukkan serapan anggaran kota Malang sangat baik, yang berarti upaya pemenuhan kebutuhan publik di kabupaten Malang selama periode

pengamatan cukup tinggi. Tingginya Belanja Modal dapat memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian daerah.

5.1.1.3 Dana Transfer Pemerintah

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel dana transfer pemerintah dapat dilihat pada Tabel 5.1. berdasarkan tabel diatas dana transfer pemerintah terendah senilai Rp.48.664.624.186 yang merupakan dana transfer pemerintah kabupaten Ponorogo pada tahun 2012. Rendahnya dana transfer pemerintah kabupaten Ponorogo disebabkan karena kabupaten Ponorogo termasuk daerah yang memiliki serapan anggaran rendah.

Disisi lain Dana Transfer pemerintah terbesar senilai Rp2.198.650.000.000 yang merupakan dana transfer pemerintah Kabupaten Malang ditahun 2013. Kondisi ini menunjukkan serapan anggaran kabupaten Malang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah Belanja Modal kabupaten Malang paling tinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu tingginya dana transfer pemerintah kabupaten Malang juga menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat mengingat pendapatan perkapita dan pendapatan asli daerah Kabupaten Malang bukan yang tertinggi di provinsi Jawa Timur.

5.1.1.4 Surplus Defisit Anggaran

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel surplus dan defisit anggaran dapat dilihat pada tabel 5.1. berdasarkan tabel tersebut, nilai defisit terendah adalah sebesar Rp.124.155.000.000 yang merupakan

defisit anggaran dari kabupaten Nganjuk pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan kabupaten Nganjuk lebih kecil dibandingkan dengan belanjanya. Daerah yang mengalami defisit anggaran dapat menutup defisit dengan Pinjaman Daerah.

Disisi lain surplus terbesar adalah senilai Rp.108.467.000.000 yang diperoleh kota Kediri. kondisi ini menunjukkan bahwa kota Kediri memiliki anggaran belanja lebih untuk meningkatkan pembangunan daerah. Sementara rata-rata dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur selama periode pengamatan mengalami surplus 15.246.766.412. Peluang dilakukan Pinjaman Daerah untuk meningkatkan pembangunan selama periode pengamatan sangat tinggi, karena terdapat surplus dana untuk melunasi Pinjaman Daerah.

5.1.1.5 Pendapatan Per Kapita

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel pendapatan per kapita dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel 5.1 diatas besarnya pendapatan perkapita terkecil adalah sebesar Rp.7,33 jutayang merupakan pendapatan perkapita kabupaten Pacitan.Adapaun rata-rata pendapatan per kapita dari kabupaten Pacitan adalah Rp. 8,15 juta. Rata-rata ini merupakan rata-rata terkecil dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Pacitan merupakan kabupaten termiskin diantara kota/kabupaten di Jawa Timur. Rendahnya pendapatan per kapita

kabupaten Pacitan disebabkan Kabupaten Pacitan hanya mengandalkan sektor pertanian yang tingkat produktivitas masih tergolong rendah.

Disisi lain pendapatan perkapita terbesar adalah sebesar Rp.255,61 juta yang merupakan pendapatan per kapita dari kota Kediri. Adapun rata-rata pendapatan perkapita kota Kediri adalah Rp.228,81 juta merupakan rata-rata tertinggi diantara kota/kabupaten di Jawa Timur. Selama periode pengamatan rata-rata pendapatan perkapita kota/kabupaten di Jawa Timur hanya senilai 27,81 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Kediri merupakan kota terkaya diantara kota/kabupaten di Jawa Timur. Tingginya pendapatan perkapita kota Kediri disebabkan oleh adanya perusahaan rokok Gudang Garam yang banyak berkontribusi bagi pendapatan daerah Kota Kediri.

5.1.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel Belanja Modal dapat dilihat pada tabel 5.1. berdasarkan tabel diatas pendapatan asli daerah terendah senilai Rp.7.224.651.386 yang merupakan pendapatan asli daerah dari Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012. Rendahnya pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan menunjukkan belum maksimalnya daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Disisi lain pendapatan asli daerah terbesar senilai Rp.1.498.190.000.000 yang merupakan pendapatan asli daerah kabupaten Mojokerto ditahun 2013. Besarnya pendapatan asli daerah kabupaten Mojokerto banyak didukung sektor industri. Sementara itu rata-rata dari

seluruh pendapatan asli daerah Jawa Timur selama hasil pengamatan adalah Rp.157.517.759.564. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah masih belum mampu untuk memenuhi Belanja Modal. Situasi ini membuka peluang dilakukannya Pinjaman Daerah.

5.1.1.7 Faktor Politik

Variabel faktor politik dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy. Variabel dummy digunakan untuk variabel yang bersifat kualitatif seperti afiliasi partai. Kepala daerah yang didukung mayoritas partai di parlemen dinyatakan dengan angka 1 dan kepala daerah yang didukung minoritas partai di parlemen dinyatakan dengan angka 0.

5.1.1.8 Pinjaman Daerah

Dari hasil analisis deskriptif untuk variabel Pinjaman Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. berdasarkan tabel di atas Pinjaman Daerah terendah senilai Rp. 1.771.002 yang merupakan Pinjaman Daerah dari kota Mojokerto pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Mengingat Belanja Modal kota Mojokerto merupakan yang terendah diantara kota/kabupaten di Jawa Timur.

Disisi lain Pinjaman Daerah terbesar senilai Rp.51.136.659.052 yang merupakan Pinjaman Daerah kabupaten Bangkalan ditahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten Bangkalan tidak mampu mencukupi kebutuhan pengeluarannya. Mengingat rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten Bangkalan dibawah rata-rata pendapatan asli

daerah kota/kabupaten di Jawa Timur dan rata-rata Belanja Modal kabupaten bangkalan jauh diatas rata-rata Belanja Modal kota/kabupaten di Jawa Timur.

5.2 Uji Statistik Inferensi

5.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual yang diperoleh dari model regresi berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah:

H_0 : Sebaran residual berdistribusi normal

H_1 : Sebaran residual tidak berdistribusi normal

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:

Tabel 5.2

Uji one sample Kolmogorov-Smirnov

| Residual | Signifikansi |
|----------|--------------|
| Model 1 | 0,772 |

Dari table 5.2 diatas, nilai signifikansi dari pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,772 lebih besar dari α (0,05). Berdasarkan ketiga pengujian tersebut, diambil keputusan terima H_0 yang artinya sebaran residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik selanjutnya tidak terjadi multikolinieritas. Salah satu metode yang digunakan dalam menguji ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$ maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5.3

Uji multikolinieritas dengan VIF

| Variabel | Tolerance | VIF |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Jumlah Penduduk | 0,392 | 2,552 |
| Belanja Modal | 0,445 | 2,245 |
| Dana Transfer Pemerintah | 0,585 | 1,709 |
| Surplus/Defisit Anggaran | 0,76 | 1,316 |
| Pendapatan Perkapita | 0,649 | 1,541 |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,597 | 1,676 |
| Faktor politik | 0,649 | 1,54 |

Dari tabel 2 di atas didapatkan bahwa semua nilai VIF dari masing-masing variabel lebih kecil dari 10 dengan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka asumsi bisa terpenuhi yang artinya antar variabel bebas tidak terdapat korelasi yang kuat (tidak terdapat multikolinieritas).

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki ragam (variance) residual yang sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki ragam residual sama (bersifat homogen). Hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 = ragam residual homogen

H_1 = ragam residual tidak homogen

Cara untuk menguji homoskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas (asumsi tidak terpenuhi). Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (asumsi terpenuhi). Dan dengan pengujian glejser dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

Bila nilai signifikansi > 0.05 ; terima H_0

Bila nilai signifikansi < 0.05 ; tolak H_0

Tabel 5.4**Uji heterokedastisitas dengan Glejser**

| Variabel | Signifikansi |
|--------------------------|--------------|
| Jumlah Penduduk | 0,157 |
| Belanja Modal | 0,373 |
| Dana Transfer Pemerintah | 0,883 |
| Surplus/Defisit Anggaran | 0,906 |
| Pendapatan Perkapita | 0,941 |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,069 |
| Faktor politik | 0,72 |

Dari hasil scatterplot pada Gambar 3 diatas, terlihat titik-titik tersebar secara acak (tak berpola) baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan dari hasil pengujian dengan uji glejser pada tabel 3, didapatkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel terhadap absolute residualnya lebih besar dari α (0,05), yang artinya bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi (ragam residual homogen).

4. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai hitung Durbin Watson dengan nilai tabel Durbin Watson (dL dan dU). Di mana hipotesis uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi antar residual

H_1 : Terdapat autokorelasi antar residual

Pengambilan keputusan dengan uji Durbin Watson dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin Watson untuk nilai $k = 7$ dan $n = 49$. Didapatkan nilai d_L sebesar 1,335 dan nilai d_U sebesar 1,850. Selanjutnya dibuat daerah keputusan sebagai berikut:

Tabel 5.5

Uji autokorelasi dengan Durbin Watson

| d_L | DW | d_U | $4-d_U$ | $4-d_L$ |
|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1,335 | 1,893 | 1,850 | 2,150 | 2,665 |

Dilihat dari durbin Watson pada tabel Model Summary (pada lampiran). Nilai kritis durbin Watson untuk $n = 49$ dan $k = 7$ adalah $d_U = 1,850$ dan $4-d_U = 2,150$. Karena nilai durbin-watson terletak di antara d_L dan $4-d_U$ maka bisa dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual (asumsi sudah terpenuhi).

5.2.2 Analisis Regresi Berganda

Untuk selanjutnya dilakukan analisis regresi yang berguna untuk mendapatkan pengaruh variabel-variabel bebas (X_1 (Jumlah Penduduk), X_2 (Belanja Modal), X_3 (dana transfer pemerintah pusat), X_4 (surplus/defisit anggaran), X_5 (pendapatan per kapita), X_6 (pendapatan asli daerah), dan X_7 (politik)) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara

variabel independen dan dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 18 didapatkan ringkasan seperti berikut:

Tabel 5.6

Ringkasan uji Regresi Linier Berganda

| Variabel | B | t_{hitung} | Signifikan | Keterangan |
|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Konstanta | -37,157 | | | |
| Jumlah Penduduk | -0,375 | -0,797 | 0,429 | Tidak Signifikan |
| Belanja Modal | 1,535 | 2,082 | 0,043 | Signifikan |
| Dana Transfer Pemerintah | 0,965 | 2,149 | 0,037 | Signifikan |
| Surplus/Defisit Anggaran | 0,01 | 0,836 | 0,407 | Tidak Signifikan |
| Pendapatan Perkapita | -0,006 | -0,891 | 0,377 | Tidak Signifikan |
| Pendapatan Asli Daerah | -0,05 | -0,15 | 0,881 | Tidak Signifikan |
| Faktor politik | 1,624 | 2,494 | 0,014 | Signifikan |

Dari tabel 5.7 diatas, diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$PD = -37,157 - 0,375 JP + 1,535 BM + 0,965 DT + 0,01 SD - 0,006 PP - 0,05PAD - 1,624 POL + e$$

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -37,157 miliar artinya tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah), maka nilai dari variabel Y sudah menurun sebesar -37,157

5.2.3 Uji t (Uji Parsial)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji t, yakni dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikan $< \alpha = 0,05$.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap Y (Pinjaman Daerah)

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap Y (Pinjaman Daerah)

Pengambilan keputusan :

H_0 ditolak jika $|t_{hitung}| > t_{tabel}$, atau nilai Signifikansi $< \alpha$

H_0 diterima jika $|t_{hitung}| < t_{tabel}$, atau nilai Signifikansi $> \alpha$

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam model penelitian secara individual dapat menjelaskan variabel independen.

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien Jumlah Penduduk sebesar -0,375. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X1 (Jumlah Penduduk) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 0,351. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X1 (Jumlah Penduduk), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan menurun.

Hipotesis H1 menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Variabel X1 (Jumlah Penduduk) memiliki statistik uji t sebesar -0,797 dengan signifikansi sebesar 0,429. Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,797 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih besar dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Jumlah Penduduk) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak berpengaruh nyata) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien Belanja Modal sebesar 1,563. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X2 (Belanja Modal) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 1,563. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X2 (Belanja Modal), maka variabel Y

(Pinjaman Daerah) akan meningkat.

Hipotesis H2 menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Nilai koefisien t hitung pada variabel probabilitas adalah 2,082 ($p=0,043$) Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,082 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian secara parsial hipotesis H2 diterima. Hal ini berarti Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Pinjaman Daerah.

3. Pengaruh Dana Transfer Pemerintah Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien dana transfer pemerintah sebesar 0,909. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X3 (dana transfer pemerintah pusat) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 0,909. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X3 (dana transfer pemerintah pusat), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan meningkat.

Hipotesis H3 menyatakan bahwa dana transfer pemerintah berpengaruh terhadap pinjaman daerah. Nilai koefisien t hitung pada variabel probabilitas adalah 2,149 ($p=0,043$) Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,149 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih kecil dari α (0,05). Dengan demikian secara parsial hipotesis H3 diterima. Hal ini berarti Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Pinjaman Daerah.

4. Pengaruh Surplus/Defisit Anggaran Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien surplus/defisit sebesar 0,01. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X4 (surplus/defisit anggaran) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi peningkatan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 0,01. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X4 (surplus/defisit anggaran), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan meningkat dan sebaliknya.

Variabel X4 (surplus/defisit anggaran) memiliki statistik uji t sebesar 0,836 dengan signifikansi sebesar 0,407. Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,836 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih besar dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 (surplus/defisit anggaran) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak berpengaruh nyata) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

5. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien pendapatan perkapita sebesar -0,006. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X5 (pendapatan perkapita) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 0,005. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X5 (pendapatan perkapita), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan menurun dan sebaliknya.

Variabel X5 (pendapatan per kapita) memiliki statistik uji t sebesar -0,891 dengan signifikansi sebesar 0,377. Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,891 < 2,009$) dan nilai *signifikan* t lebih besar dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_5 ditolak. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X5 (pendapatan per kapita) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak berpengaruh nyata) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar -0,05. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X6 (pendapatan asli daerah) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi penurunan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 0,05. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X6 (pendapatan asli daerah), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan menurun dan sebaliknya.

Variabel X6 (pendapatan asli daerah) memiliki statistik uji t sebesar -0,15 dengan signifikansi sebesar 0,881. Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,15 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih besar dari α (0,05). 2,149 Pengujian ini menunjukkan bahwa H_6 ditolak. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X6 (pendapatan asli daerah) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak berpengaruh nyata) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

7. Pengaruh Faktor Politik Terhadap Pinjaman Daerah

Nilai koefisien 1,624. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 1 pada variabel X7 (kepala daerah didukung mayoritas partai) dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi kenaikan pada variabel Y (Pinjaman Daerah) sebesar 1,624. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel X7 (kepala daerah didukung mayoritas partai), maka variabel Y (Pinjaman Daerah) akan meningkat.

Variabel X7 (politik) memiliki statistik uji t sebesar 2,494 dengan signifikansi sebesar 0,016. Nilai statistik uji $|t_{hitung}|$ tersebut lebih besar daripada t_{tabel} ($2,494 < 2,010$) dan nilai *signifikan* t lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_7 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X7 (politik) berpengaruh secara signifikan (berpengaruh nyata) terhadap variabel Y (Pinjaman Daerah).

5.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi, pembahasan dalam penelitian ini membahas hubungan antar variabel yang akan dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini antara lain:

5.3.1 Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah

Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah merupakan variabel pertama, dimana hipotesis ini setelah dilakukan uji statistik maka hipotesis ini ditolak (H_1 ditolak). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Balaguer *et.al* (2013), Banito dan Fransisko (2004) di Spanyol

yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak mempengaruhi hutang kota. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya Jumlah Penduduk tidak selalu beriringan dengan peningkatan hutang pemerintah.

Penjelasan hipotesis ditolak karena dengan adanya besarnya Jumlah Penduduk tidak serta merta hutang pemerintah juga meningkat, karena dengan Jumlah Penduduk besar, pemerintah akan lebih menseleksi kebutuhan publik yang sangat dibutuhkan terlebih dahulu. selain itu potensi daerah yang besar dapat memenuhi kebutuhan penduduk tanpa melalui hutang.

5.3.2 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah

Pada hipotesis ini diterima (H2 diterima). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pinjaman Daerah menunjukkan hubungan yang positif. Sesuai dengan hasil penelitian Mulyono (2008), Escudero (2002) dan Balaguer *et.al* (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan hutang kota. Temuan ini juga sesuai dengan teori Belanja Modal yang disampaikan Abgonyitor (1999) bahwa kestabilan fiskal pemerintah negara bagian dapat dicapai jika kebutuhan Belanja Modal terpenuhi dengan pinjaman.

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang khusus digunakan untuk barang-barang modal. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat Belanja Modal tinggi yang tidak diimbangi dari sisi penerimaan akan mencari sumber pembiayaan yang lain berupa Pinjaman Daerah.

5.3.3 Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pinjaman Daerah

Hipotesis ini diterima (H3 diterima). Pengaruh dana transfer pemerintah terhadap Pinjaman Daerah menunjukkan hubungan yang positif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Benito dan Fransisco (2004), Bird dan Ariel (2000) dan Mulyono (2008) yang menemukan bahwa dana transfer pemerintah memiliki hubungan positif dengan Belanja Daerah. argumentasi dari temuan ini adalah dana transfer pemerintah merupakan jaminan daerah untuk memenuhi kewajiban Pinjaman Daerah.

Berdasarkan data yang ada hampir sebagian besar penerimaan daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Untuk memenuhi tingginya kebutuhan Belanja Modal yang tidak tercukupi oleh dana transfer pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan melakukan Pinjaman Daerah. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah memiliki dana yang pasti untuk melunasi Pinjaman Daerah.

5.3.4 Pengaruh Surplus/Defisit Anggaran Terhadap Pinjaman Daerah

Hipotesis ini di tolak (H4 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Balaguer *et.al* (2013), Brusca dan Labrador (1998) dan Mulyono (2008) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat defisit anggaran maka semakin tinggi hutang kota. Surplus defisit anggaran merupakan salah satu indikator keuangan di daerah. daerah yang mengalami surplus kemungkinan akan melakukan Pinjaman Daerah dan melunasi dengan surplus anggarannya. Sementara yang mengalami defisit akan menutup defisitnya dengan Pinjaman Daerah.

Argumentasi dari temuan ini adalah rata-rata pemerintah daerah di Jawa Timur selama periode penelitian mengalami surplus yang tinggi selain

itu, dalam praktiknya pemerintah daerah dalam melakukan Pinjaman Daerah tidak memperhatikan besarnya surplus/defisit anggaran namun melihat pentingnya memenuhi kebutuhan publik dari program anggaran yang telah dibuat.

5.3.5 Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pinjaman Daerah

Hipotesis ini di tolak (H5 ditolak). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Brusca dan Labrador (1998), Kiewet dan Szalasky (1996) dan Mulyono (2008) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap Pinjaman Daerah. Namun, sesuai dengan hasil penelitian Pogoe (1970) yang menjelaskan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah. Argumentasi dari temuan ini adalah pendapatan per kapita yang tinggi belum tentu meningkatkan konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi menyebabkan tingkat konsumsi tinggi yang berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah daerah dari pajak. Sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan publik walaupun tidak dari sumber Pinjaman Daerah. Selain itu Pendapatan perkapita merupakan faktor makro yang tidak terkait dengan anggaran pemerintah.

5.3.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pinjaman Daerah

Hipotesis ini di tolak (H6 ditolak). Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Brown (1996), De Mello (2001) , Balaguer *et.al* (2013) dan Mulyono (2008) yang menyatakan tingginya kepemilikan sumber daya meningkatkan Pinjaman Daerah karena daerah mampu untuk membayar kewajibannya dengan sumber daya daerah yang dimilikinya. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang tinggi memiliki tingkat pelunasan yang tinggi pula.

Hipotesis ini ditolak karena rata-rata pendapatan asli daerah kota/kabupaten di Jawa Timur cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan publik tanpa melakukan Pinjaman Daerah.

5.3.7 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Pinjaman Daerah

Hipotesis ini diterima (H7 diterima). Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Balaguer *et.al* (2013) yang menyatakan bahwa koalisi partai dalam dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Pinjaman Daerah. Faktor politik menjadi pertimbangan untuk untuk menentukan besarnya Pinjaman Daerah. hal ini dikarenakan persetujuan dewan dibutuhkan untuk pengajuan Pinjaman Daerah jangka panjang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

Suatu daerah apabila hubungan kepala daerah dengan DPRD tidak harmonis maka akan terjadi konflik kepentingan antar lembaga tersebut. Dampaknya adalah usulan program pemerintah yang membutuhkan persetujuan dewan akan mengalami kesulitan. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas kepala daerah yang terpilih di

Kabupaten/Kota di Jawa Timur didukung oleh fraksi-fraksi di DPRD, sehingga pemerintah daerah akan lebih mudah untuk melakukan Pinjaman Daerah. uraian ini menjelaskan bahwasanya faktor politik berpengaruh terhadap Pinjaman Daerah.